

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tatat Pemerintahan*. Identitas Universitas Hasanuddin Makassar.

Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. 2007. *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

A. Ridwan Halim. 1985. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: Ghalia, Indonesia.

Barda Nawawi Arief. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.

Boedi Harsono. 2003. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Penerbit Djambatan.

_____. 2000. *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Penerbit Djambatan. (selanjutnya disebut Boedi Harsono I)

Dominikus Rato. 2010. *Filsafat Hukum Mencari Menemukan Dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Fernando M. Manullang. 2007. *Hukum Dalam Kepastian*. Bandung: Prakarsa.

Habib Adjie. 2010. *Merajut Pemikiran dalam Dunia Notaris dan PPAT*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti)

H. Salim HS. 2016. *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

Jan Michiel Otto. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: Revika Aditama.

Khudzaifah Dimiyati. 2005. *Teoritisasi Hukum Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.



Wedjosaputro. 2003. *Etika Profesi dan Profesi Hukum*. Semarang: Neka Ilmu.

Lon L. Fuller. 1971. *The Morality of Law* (McGraw-Hill: Yale University Press).

Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

M. Kadarisman. 2013. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Rajawali.

Muhammad Sadi Is. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.

Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. 2008. *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bandung: Mandar Maju.

Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia).

Romli Atmasasmita. 2000. *Perbandingan Hukum Pidana*. Cetakan ke II. Bandung: Cikutra Baru.

R Soeroso.1999. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rudi Indrajaya *et.al*. 2020. *Notaris dan PPAT Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.

Pipin Syarifin dan Zarkasy Chumaidy.1998. *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung..

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pres.

Samsaimun. 2018. *Peraturan Jabatan PPAT (Pengantar Pengatur Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Peralihan Hak Atas Tanah di Indonesia)*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudikno Mertokusumo. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

_____ 2010. *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____ 2004. *Penemuan Hukum*. Jakarta: Liberty.



o Dirdjosisworo. 2010, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo inggi, Jakarta.

Teguh Samudra. 2004. *Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata*, edisi pertama, Alumni Bandung.

Van Apeldorn. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum cetakan kedua puluh empat*. Jakarta. Pradnya Paramita.

Yati Nurhayati, 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Nusa Media.

Jurnal

Addien Iftitah. 2014. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Ppat) Dalam Membuat Akta Jual Beli Tanah Beserta Akibat Hukumnya*. Jurnal Lex Privatum. Volume 2. Nomor 3. Fakultas Hukum. Universitas Sam Ratulangi. Manado.

Baharudin. 2014. *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*. Jurnal Keadilan Progresif. Volume 5. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Bandar Lampung.

Fence M. Wantu. 2007. *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*. Jurnal Berkala Mimbar Hukum. Volume 19. Nomor 3. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.

Hanna Messiah Rahmah. 2015. *Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*. Universitas Brawijaya. Jurnal Hukum.

Henny Saida Flora. 2008. *Hubungan Antara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Proses Pendaftaran Tanah*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 26 Nomor 4, Universitas Katolik Perahyangan.

Purwanti, N. & Amin, A. (2016). *Kepatuhan ditinjau dari kepribadian ekstrovert- introvert*. Jurnal Psikologi, Volume 3 Nomor 2, Universitas Yudharta Pasuruan.

Sidabuke dan Sudiman. 2008. *Kepastian Hukum Perolehan Tanah Bagi Investor*, Jurnal yustika. Volume 10. Nomor 1. Fakultas Hukum. Universitas Surabaya.

Tata Wijayanti. 2014. *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*. Jurnal Dinamika Hukum. Volume 14. Nomor 2. Fakultas Hukum. Universitas Gadjah Mada.



Website

<https://m.mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/55585/inilah-syarat-baru-jadi-pejabat-pembuat-akta-tanah>

<https://www.change.org/p/pengurus-pusat-pengurus-wilayah-pengurus-daerah-ippat-keberatan-atas-diberlakukannya-perkum-nomor-01-perkum-ippat-2021>.

[https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori Kepastian Hukum Menurut Gustav Radbruch](https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/#Teori%20Kepastian%20Hukum%20Menurut%20Gustav%20Radbruch).

<https://ppipat.org/wp/2022/10/10/diklatsar-i-ii-dan-pembekalan-kode-etik-calon-ppat-kembali-digelar/>

<https://ppipat.org/wp/2022/09/01/pendaftaran-alb-ippat-gelombang-3-dibuka/>

<https://www.detikmahasiswahukum.com/2020/05/prinsip-hukum-menurut-prof-lon-luvis.html>

<https://adcolaw.com/id/blog/hukum-positif-dan-keberadaannya/#:~:text=Hukum%20positif%20adalah%20kumpulan%20a,s,atau%20pengadilan%20dalam%20Negara%20Indonesia>.



an Perundang-undangan

Undang Dasar Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor : 01/Perkum/IPPAT/2021 Tentang Kartu Tanda Anggota (KTA) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Peraturan Perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 02/PERKUM/IPPAT/2022 tentang Magang.

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Pengesahan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2016 tentang Tata Cara Ujian, Magang, Dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Anggaran Dasar Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT).

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.





Optimized using
trial version
www.balesio.com